

BAB V

SKENARIO KONDISI LINGKUNGAN DAN CAPAIAN TPB

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) untuk pencapaian target TPB pada tahun 2023 berdasarkan kinerja Kabupaten Temanggung yang telah dilakukan selama ini.

Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kabupaten Temanggung. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta gap terhadap indikator dalam TPB nasional dalam **Perpres No. 59 tahun 2017** yang merupakan target sampai dengan tahun 2030.

5.1. Skenario Kondisi Lingkungan Hidup

Sesuai dengan enam muatan kondisi lingkungan hidup dalam KLHS seperti tertuang dalam PP No. 46 tahun 2016, menunjukkan skenario perubahan status lingkungan hidup Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang. Berikut adalah skenario status kondisi lingkungan hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Temanggung yang disusun.

5.1.1. Skenario Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung Air Permukaan

Akses air minum dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak pada tahun 2013 sebesar 161.662 rumah tangga dan pada tahun 2017 sebesar 205.907 rumah tangga. Jadi dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat dari 71,85 % menjadi 82,67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

Skenario yang dibangun dalam perhitungan daya dukung air pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan tutupan lahan sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031, yang mana akan terjadi peningkatan luas kawasan pertanian lahan basah sesuai arahan LP2B Provinsi Jawa Tengah, serta peningkatan lahan permukiman.

- b. Peningkatan luasan kawasan peruntukkan industry yang akan meningkatkan kebutuhan air bersih untuk industry dengan pendekatan perhitungan kebutuhan dari jumlah pekerja industri.
- c. Pertambahan penduduk dengan mengikuti tren pertumbuhan saat ini yang akan meningkatkan kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga.

Berikut adalah hasil perhitungan berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung 2011–2031 dan perkiraan pada tahun 2023 dengan memperkirakan adanya perubahanlahan, peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan kebutuhan air untuk irigasi dan industri.

Tabel 5.1. Koefisien Limpasan Tutupan Lahan Kabupaten Temanggung 2023

| Penggunaan Lahan | Luas | Koefisien | Luas x Koefisien |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Hutan Negara | 8.399,0001 | 0,18 | 1.511,82 |
| Hutan Rakyat | 3.764,04 | 0,18 | 677,52 |
| Hutan Lainnya | 1.962,04 | 0,2 | 392,40 |
| Permukiman Perkotaan | 15.510,0 | 0,7 | 10.857,00 |
| Pertanian Lahan Basah | 20.600,0 | 0,3 | 6.180,00 |
| Pertanian Lahan Kering | 27.801,0 | 0,3 | 8.340,30 |
| Tanaman Tahunan/Perkebunan | 8.729,0 | 0,35 | 3.055,15 |
| Total | 87.065,0 | 0,35 | 31.014,19 |

Sumber: Perhitungan berdasar Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 dan menggunakan tutupan lahan dari Rencana Pola Ruang Kabupaten Temanggung 2011-2031

$$\begin{aligned}
 SA &= 10 \times C \times R \times A \\
 &= 10 \times 0,35 \times 2.970 \times 87.065,00 \\
 &= \mathbf{905.040.575 \text{ m}^3/\text{tahun}}
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan pendekatan rincian kebutuhan maka total kebutuhan air di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah diperkirakan sebesar 659.905.085 m³/tahun dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Perkiraan Kebutuhan Air 2023 Kabupaten Temanggung

| Kebutuhan | Jumlah | Satuan | Kebutuhan | Satuan | Kebutuhan air |
|-------------------|-----------|--------|-----------|--------------------|--------------------|
| Penduduk | 772.289 | Jiwa | 100 | ltr/hr/kapita | 28.188.548 |
| Sawah Irigasi | 19.788,00 | (Ha) | 1 | liter/detik/hektar | 624.034.368 |
| Sawah Tadah Hujan | 812,00 | (Ha) | 0,3 | liter/detik/hektar | 7.682.169 |
| Total | | | | | 659.905.085 |

Sumber: Perhitungan Tim KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung 2018

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa air permukaan diperkirakan akan mengalami surplus pada tahun 2023 jika upaya yang dilakukan mengikuti tren yang ada

saat ini (*Bussiness as Usual*). Surplus tersebut sekitar 250 juta m³/tahun. Jadi daya dukung air permukaan naik dari tahun 2017 menjadi **1,37** pada tahun 2023. Jika proyeksi ditambahkan sampai dengan tahun 2030 sesuai arahan TPB maka variabel peningkatan ditambahkan pada jumlah penduduk, sedangkan faktor lainnya dinyatakan tetap maka akan ada kenaikan kebutuhan menjadi 661.925.896 m³. Dengan demikian daya dukung air pada 2030 menjadi 1,36 atau defisit sebesar 2,02 juta m³.

Skenario pada masa yang akan datang didasarkan pada rencana tata ruang Kabupaten Temanggung, yang memperkirakan akan terjadi Surplus tersebut sekitar 250 juta m³ atau daya dukung air diatas 1. Idealnya untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa akses terhadap sumber air harus mencapai 100% dari kebutuhan maka dibutuhkan kondisi DD air minimal 1.

Dengan penerapan efisiensi penggunaan air dalam pertanian sampai dengan 30% maka kebutuhan air secara total dapat turun sebanyak 0,36 milyar m³/tahun sehingga daya dukung air dapat dinaikkan menjadi 1,24 atau surplus sebesar 0,26 milyar m³. Skenario penerapan efisiensi penggunaan air pada pertanian juga dapat meningkatkan daya dukung air Kabupaten Temanggung sampai tahun 2030.

2) Daya Dukung Pangan

Konsumsi beras mulai tahun 2016 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124,89 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)⁴. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung :

Tabel 5.3. Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

| Tahun | 2023 |
|---|---------------|
| Jumlah produksi padi (ton) | 186.206 |
| Konversi Gabah Giling/GKG ke beras (62,74%) | 116.825 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 822.257 |
| Angka konsumsi beras (kg/tahun) | 124,89 |
| Jumlah beras dikonsumsi (ton) | 102.691 |
| DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan | 1,14 |
| Surplus beras (Ton/Tahun) | 14.134 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

⁴Perhitungan yang digunakan SUSENAS - BPS

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Temanggung berpotensi naik sampai dengan **1,14** dengan kondisi surplus sebesar 14.134 ton. Skenario yang dibangun dalam kenaikan daya dukung pangan pokok beras ini adalah penetapan LP2B juga didukung dengan rehabilitasi dan pembangunan

system jaringan irigasi terutama untuk meningkatkan lahan tadah hujan menjadi lahan basah dengan system irigasi yang dapat mendukung produktivitas tahunan pertanian.

Dengan scenario adanya penetapan LP2B sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung serta peningkatan teknologi dalam mengelola GKG menjadi beras lebih efisien, maka daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung akan meningkat surplusnya dari 11 ribu ton menjadi 14 ribu ton. Dengan DD Pangan meningkat menjadi 1,14 artinya Kabupaten Temanggung tetap dapat meningkatkan kontribusinya secara regional dan nasional. Oleh sebab itu agar skenario daya dukung pangan pokok beras meningkat surplusnya pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu di kembangkan adalah.

- a. Menetapkan dan melindungi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sesuai arahan RTRW mencapai sekitar 18.920 hektar melalui LP2B dan menerapkan indeks tanam sampai dengan 2.
- b. Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan.
- c. Diversifikasi pangan melalui penerapan gizi berimbang untuk menurunkan konsumsi beras per kapita.

3) Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan guna lahan eksisting pada tahun 2017 maka koefisien lindung Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori sedang menuju baik yaitu sebesar 0,35. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang membuat rencana pola ruang sampai dengan tahun 2031 menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi lindung terutama untuk kawasan hutan dan sempadan sungai. Meskipun ada perubahan lahan pada masa yang akan datang untuk kebutuhan pembangunan, tetapi upaya untuk meningkatkan konservasi lahan melalui peningkatan tutupan lahan pada lahan terbuka, kebun, semak maupun lading dilakukan untuk tetap meningkatkan tutupan lahan dan fungsi lindung. Berdasarkan rencana yang ditetapkan dalam rencana pola ruang pada tahun 2031 koefisien lindung Kabupaten Temanggung nilainya meningkat menjadi 0,37.

Tabel 5.4. Koefisien Limpasan Tutupan Lahan Kabupaten Temanggung 2023

| Penggunaan Lahan | Luas | Koefisien | Luas x Koefisien |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Hutan Negara | 8.399,0 | 0,18 | 1.511,82 |
| Hutan Rakyat | 3.764,0 | 0,18 | 677,52 |
| Hutan Lainnya | 1.962,0 | 0,20 | 392,40 |
| Permukiman Perkotaan | 15.510,0 | 0,70 | 10.857,00 |
| Pertanian Lahan Basah | 20.600,0 | 0,30 | 6.180,00 |
| Pertanian Lahan Kering | 27.801,0 | 0,30 | 8.340,30 |
| Tanaman Tahunan/Perkebunan | 8.729,0 | 0,35 | 3.055,15 |
| Total | 87.065,0 | 0,35 | 31.014,19 |

Sumber: Perhitungan berdasar Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 dan menggunakan tutupan lahan dari Rencana Pola Ruang Kabupaten Temanggung 2011-2031

Tabel 5.5. Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Temanggung 2031

| Jenis Tata Guna Lahan | Luas (ha) | C. Lindung | Σ (Ci x Ai) |
|----------------------------|-----------------|------------|------------------|
| Hutan Negara | 8.399,0 | 1,00 | 8.399,0001 |
| Hutan Rakyat | 3.764,0 | 0,68 | 2.559,53 |
| Hutan Lainnya | 1.962,0 | 0,68 | 1.334,29 |
| Permukiman Perkotaan | 15.510,0 | 0,18 | 2.791,84 |
| Pertanian Lahan Basah | 20.600,0 | 0,46 | 9.476,0 |
| Pertanian Lahan Kering | 27.801,0 | 0,21 | 5.838,24 |
| Tanaman Tahunan/Perkebunan | 8.729,0 | 0,21 | 1.833,13 |
| TOTAL | 87.065,0 | | 32.231,82 |

Sumber: Analisis, 2018

$$\text{DDL Lindung} = 32.231,8/87.231,8$$

$$= \mathbf{0,37}$$

Dengan asumsi pertumbuhannya linier maka pada tahun 2023 diperkirakan daya dukung lindung mencapai 0,37 atau naik 0,02 dari tahun 2017 yang telah mencapai 0,35. Kenaikan ini didorong oleh rencana tata ruang Kabupaten Temanggung yang mengalokasikan peningkatan kawasan lindung.

Skenario BAU daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang didasarkan pada perwujudan ruang di Kabupaten Temanggung sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTRW. Meskipun ada peningkatan peruntukan kawasan terbangun serta infrastruktur, tetapi adanya strategi tata ruang untuk mewujudkan sempadan sungai tutupan vegetasi yang lebih luas dari kondisi saat ini maka perwujudan daya dukung fungsi lindung dapat meningkat pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu agar scenario daya dukung fungsi lindung dapat terwujud sesuai dengan arahan tata ruang pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah.

- a. Mewujudkan peruntukkan kawasan lindung sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung untuk mempertahankan daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang.
- b. Mewujudkan tutupan lahan yang sesuai dengan peruntukkan melalui upaya-upaya penanganan lahan kritis pada kawasan hutan dan kawasan lindung.
- c. Bekerjasama dengan provinsi untuk mendorong peningkatan lahan pada kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat.

4) Daya Dukung Lahan Terbangun

Perhitungan daya dukung bangunan pada tahun 2023 menggunakan asumsi perubahan linier terhadap rencana pola ruang RTRW sampai dengan 2031. Penggunaan lahan yang direncanakan dalam pola ruang Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa sampai dengan 2031 luasterbangun mencapai 15.510 hektar untuk permukiman dan peruntukkan industri. Luas lahan untuk infrastruktur seluas 20% dari terbangun, sehingga luas bangunan

menjadi 18.612 hektar. Daya dukung lahan terbangun menjadi 2,81 seperti perhitungan berikut.

Luas Wilayah Kabupaten Temanggung menurut peta RTRW adalah 87.065 Ha $LTp = 15.510$ Ha, dan $LTb = 18.612$ Ha.

$$DDLb = a * Lw = 60\% * 87.065$$

$$LTb \quad 18.612$$

$$= 2,81$$

DDLb Kabupaten Temanggung pada 2031 diperkirakan akan turun menjadi 2,81 dibanding tahun 2017 yang mencapai 2,86. Kondisi tersebut masih menunjukkan daya dukung lahan masih dalam kategori sedang mendekati baik. Namun distribusinya perlu memperhatikan karakteristik masing-masing kecamatan. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung, kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk hanya satu kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung, sedangkan untuk kategori bersyarat/sedang terdapat 7 kecamatan, demikian juga untuk kategori baik terdapat 12 kecamatan. Jika menggunakan skenario perkembangan yang linier maka pada tahun 2023 daya dukung lindung diperkirakan mencapai 2,84 atau turun sebesar 0,02 dari tahun 2017.

Skenario BAU daya dukung lahan terbangun dengan mengikut skenario perwujudan RTRW Kabupaten Temanggung maka pada tahun 2031 akan mencapai 2,81 atau diperkirakan menurun sekitar 0,05 pertahun. Dengan demikian pada tahun 2023 diperkirakan dengan penurunan linier maka daya dukung mencapai 2,84. Kondisi daya dukung dikatakan baik jika minimal adalah 3, dengan demikian maka perlu beberapa strategi yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Temanggung untuk mempertahankan daya dukung bangunan pada kondisi baik melalui :

- a. Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong penggunaan bangunan vertical sesuai kemampuan lahan untuk efisiensi penggunaan lahan terutama untuk kawasan peruntukkan permukiman perkotaan.
 - b. Penerapan 30% RTH pada kawasan terbangun terutama permukiman tetap menyediakan ruang terbuka.
- 5) Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sampai 2023 Berdasarkan pada perhitungan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi daya dukung air, pangan, lindung dan lahan terbangun yang telah dilakukan. Maka perubahan pada masing-masing daya dukung lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Temanggung sampai 2023

| No | Daya Dukung LH | 2017 | 2023 | Keterangan |
|----|-----------------------------|------|------|--|
| 1 | Daya Dukung Air Permukaan | 1,24 | 1,37 | Terlampai akibat peningkatan kebutuhan penduduk dan pertanian |
| 2 | Daya Dukung Pangan | 1,11 | 1,14 | Naik dengan adanya penetapan LP2B dalam RTRW serta didukung jaringan irigasi yang dapat meningkatkan produktivitas |
| 3 | Daya Dukung Lahan Terbanqun | 2,86 | 2,84 | Turun adanya peningkatan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri |
| 4 | Daya Dukung Fungsi Lindung | 0,35 | 0,37 | Naik, adanya peningkatan kawasan berfungsi lindung sesuai arahan RTRW |

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung, 2018

5.1.2. Skenario Sampah

Perkiraan timbulan sampah sampai dengan 2023 diperkirakan mencapai **173.233** ton per tahun di Kabupaten Temanggung. Asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,88% pertahun. Peningkatan persentase layanan sampah harus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Dengan pelayanan pengangkutan yang tetap seperti saat ini sebesar 9,16 % maka sampah yang akan dikelola di TPA pada tahun 2023 mencapai **17.678 ton per tahun atau naik sekitar 3.481 ton dari 2017**. Berikut adalah tabel perkiraan peningkatan jumlah timbulan sampah yang mengikuti pertumbuhan penduduk.

Tabel 5.7. Perkiraan Timbulan Sampah sampai 2023

| Tahun | Timbulan Sampah (ton) | Jumlah Penduduk |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| 2016 | 139.908 | 752.486 |
| 2017 | 141.143 | 759.128 |
| 2018 | 142.385 | 765.808 |
| 2019 | 143.638 | 772.547 |
| 2020 | 144.902 | 779.346 |
| 2021 | 146.177 | 786.204 |
| 2022 | 147.463 | 793.123 |
| 2023 | 168.565 | 800.102 |
| 2030 | 179.227 | 850.709 |

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung, 2018

Untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah di atas maka perlu dikembangkan beberapa strategi berikut.

- Peningkatan layanan untuk perkotaan mencapai 100% sedangkan di perdesaan sekitar 20%
- Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R
- Mengembangkan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R dengan ditambah landfill.

- Mengembangkan TPA sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi PLTSa dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA
- Sesuai Jakstrada Kabupaten Temanggung untuk penanganan sampah sebanyak 70 % dan pengurangan 30 %.

5.1.3. Skenario Gas Rumah Kaca

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

5.2. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2023 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing pilar yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional, indikator yang belum ada dalam target RPJMD dan indikator yang tidak ada data tetapi relevan di Kabupaten Temanggung yang diusulkan untuk dapat dimasukkan.

Tabel 5.8. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Temanggung

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|--|----------|--|--|------------------------------|--------|---------|-------|---------------------------------------|--------------|------|-------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| PILAR LINGKUNGAN | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA | | | | | | | | | | | | |
| SB | 6.1.1.a | Mencapai akses yang adil merata terhadap air minum yang aman untuk dikonsumsi dan terjangkau | Cakupan layanan air minum yang layak | DPUPKP | % | 86.6 | 89.78 | meningkat | 100% | 1.59 | 1.70 | 89 |
| SB | 6.1.1. b | Mencapai kondisi jaringan sumber air dalam kondisi baik dan adil | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | DPUPKP | % | 5.6 | 14.38 | meningkat | 118,6 m3/dtk | 4.39 | 14.27 | 59.32 |
| | | Mencapai ketersediaan air dan terjaga dari sumber pencemaran dan kapasitas air baku tetap stabil | Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada | DPUPKP | % | 72 | 83.88 | tidak ada target nasional | | | | |
| SS | 6.2.1.b | Mencapai akses sanitasi prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan | Cakupan sanitasi pemukiman yang layak | DPUPKP | % | 75.51 | 80.24 | meningkat | | 2.36 | 3.29 | 100 |
| SB | 6.2.1.d | Mencapai akses menghentikan buang air besar di tempat terbuka | Prosentase Desa ODF (Open Defecation Free) | DINKES | % | | 7.61 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - | 15.40 | 100 |
| NA | 6.3.2. | Mencapai akses sarana prasarana pengolahan limbah cair sehingga kualitas air terjamin | Fasilitas pengolahan air limbah pada usaha/ kegiatan skala kecil menengah | DLH | Unit | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - | - | 9 |
| TTC | 6.4.2. | Peningkatan jumlah embung dan pengelolaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air baku | Jumlah embung (buah) | DLH, DINTAN KP | Buah | 19 | 23 | Ada (tidak ada target nasional) | | 2.00 | 12.83 | 27 |
| TTC | 6.5.1. | Tercapainya penyediaan air baku dan terpenuhinya kebutuhan air untuk sarana pertanian dan yang lain | Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada | DPUPKP | | 72 | 83.88 | ada (tidak ada target nasional) | | | | |
| NA | 6.b.1. | Tercapainya jumlah kelompok swadaya masyarakat pada pelaksanaan pengelolaan air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih | Jumlah program terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi | BAPPEDA, DPUPKP, DINKES, DLH | | 3 | 3 | Ada | | | | 1 |
| TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN | | | | | | | | | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-------------|---|--|-------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | 11.1.1 | Terpenuhinya peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan dengan tetap mempertimbangkan upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | DPUPKP | Hektar | 28.81 | 19.91 | Menurun (tidak ada target nasional) | | - 4.45 | 13.35 | 0.315 |
| TTC | | Terpenuhinya peningkatan sarana tempat buang air besar dan merubah perilaku buang air besar sembarangan | % rumah tangga yang menggunakan jamban atau tempat buang air besar dengan menggunakan tangki septik/SPAL | BPS | % | 29.3 | 37.1 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Terpenuhinya pelayanan akses air bersih berkelanjutan dari PAM/PDAM untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat | % kecamatan yang mayoritas penduduknya menggunakan air yang berasal dari PAM/PDAM untuk minum/memasak | BPS | % | | 17.55 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 11.1.1.(a) | Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar dan menata kawasan kumuh | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | DPUPKP | % | 95.24 | 97.01 | 3,7 juta rumah tangga | 3,7 juta | | | |
| TTC | 11.2 .1.(a) | Terpenuhinya akses sarana prasarana transportasi yang terjangkau masyarakat | Jumlah Kecamatan yang melakukan pengembangan angkutan umum dan masal di Kab. Temanggung | DISHUB | Kecamatan | 18 | 18 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | 11.4.1 | Meningkatnya jumlah anggota kesenian dan budaya dengan SDM yang berwawasan lingkungan | Cakupan SDM kesenian | DISBUDPAR | % | 62.5 | 75 | Meningkat | 100 | 6.25 | 4.17 | 100 |
| TTT | | Meningkatnya jumlah anggota kesenian dan budaya dan terselenggaranya festival seni budaya yang berwawasan lingkungan | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | DISBUDPAR | Paket | 3 | 1 | Meningkat | 2 | - 1.00 | 0.17 | 2 |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|-------------|--|--|-------------|----------|---------|-------|---|--------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTT | | Tercapainya pelestarian budaya masyarakat dan pengelolaan lingkungan untuk melindungi atau mempertahankan keutuhan fisik sebagai sarana pendidikan | Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan. | DISBUDPAR | % | 100 | 53.19 | Meningkat | 100 | - 23.41 | 7.80 | 100 |
| TTC | | Terpenuhinya penganut kejawan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan | Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME (Jumlah penghayat)/KEJAWEN | DISBUDPAR | Kelompok | 12 | 12 | Ada | | - | - | 12 |
| TTC | | Tercapainya peningkatan pelestarian cagar budaya | Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah | DISBUDPAR | % | 100 | 100 | Meningkat | | - | - | 100 |
| SB | 11.5.1.(b) | Terealisasinya desa tangguh bencana dengan penyiapan sarana prasarana yang memadai | Cakupan desa tangguh bencana | BPBD | | | 6.52 | Meningkat | | 3.26 | - | 3 |
| NA | 11.6.1 | Terpenuhinya pengurangan produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali | Meningkatnya sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah (unit) | DLH | % | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - | - | 2 |
| SB | 11.7.1. (a) | Terpenuhinya lahan untuk RTH di kawasan perkotaan sebagai upaya mencegah perubahan iklim | Prosentase tersedianya luas ruang terbuka hijau (RTH) dari luasan wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten | DLH | % | | 35 | Meningkat menjadi 80% | 80% | | | |
| SB | 12.4.2.(a) | Tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua limbah udara, cair, tanah yang ramah lingkungan. | Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 bagi pelaku usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pelaku) | DLH | % | | 60 | Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) | 150 juta ton | | | |
| SB | 12.5.1.(a) | Terpenuhinya kegiatan pengelolaan sampah secara maksimal dan berkelanjutan | Prosentase Bank Sampah yang aktif | DLH | Kelompok | | 43 | 20 ton per hari (skala nasional) | 20 ton/hari | | | |
| SS | 12.b.1 | Tercapainya peningkatan jumlah wisatawan lokal atau mancanegara | Presentase peningkatan jumlah wisatawan | DISBUDPAR | | 8 | 12.27 | Meningkat | | | | |
| TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA | | | | | | | | | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|--------|---|--|-------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| | 13.2.1 | | Jumlah emisi karbondioksida (CO2e) untuk masing-masing sektor : | | | | | | | | | |
| NA | | Pemenuhan kebutuhan energi/listrik untuk sarana transportasi, industri, komersial, rumah tangga | a) Energi | DLH | Ton | | | Menurun | | | | |
| NA | | Mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan | b) IPPU (Industrial Processes and Production Use) | DLH | Ton | | | Menurun | | | | |
| NA | | Mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan | c) AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Landuse) | DLH | Ton | | | Menurun | | | | |
| NA | | Mencapai pengelolaan limbah dari semua sektor industri, transportasi secara berkelanjutan | d) Limbah | DLH | Ton | | | Menurun | | | | |
| SB | | Terlaksananya aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penerapan strategi pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim, terus dikembangkan dan diperkuat pelaksanaannya secara berkelanjutan. | Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara vegetatif (kampung iklim) | DLH | Proklam | | 2 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 13.3.1 | Tercapainya program untuk menginternalisasikan kegiatan lingkungan pada skala pendidikan | Cakupan sekolah berwawasan lingkungan | DLH | | | 20.14 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI & PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA & MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN | | | | | | | | | | | | |
| | 14.4.1 | Terpenuhinya produksi perikanan darat yang di konsumsi oleh masyarakat secara berkelanjutan | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum | DINNAKAN | Ton | 311.87 | 664.38 | Meningkat menjadi 6.982.560 ton | | | | |
| TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN | | | | | | | | | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|-----------|---|---|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|---|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SB | 15.3.1 | Tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia | Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan Temanggung | DLH | Batang | | 636,880 | | | | | |
| NA | 15.6.1 | Tercapainya upaya konservasi spesies dan genetik sehingga kelestarian tetap terjaga | Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik | Balai Konservasi Sumber Daya Alam | | | | ada (tidak ada target nasional) | | | | |
| NA | 15.a.1 | Tercapainya upaya pelestarian dan keanekaragaman hayati | Meningkatnya sumber daya keuangan untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati | Balai Konservasi Sumber Daya Alam | | | | ada (tidak ada target nasional) | | | | |
| PILAR SOSIAL | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN | | | | | | | | | | | | |
| SB | 1.2.1* | Mengurangi jumlah angka kemiskinan | Persentase Angka Kemiskinan | BPS, BAPPEDA, DINSOS | % | 11.76 | 11.46 | Menurun menjadi 7-8% | 7-8 % | | | |
| SS | 1.3.1 (a) | Terpenuhinya peserta penerima bantuan secara adil dan merata | Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) | DINSOS, DKK,RSU | % | 100 | 100 | Meningkat menjadi 95% | 95% | | | |
| SB | 1.3.1 (b) | Terpenuhinya peserta penerima jamsostek secara adil dan merata | Meningkatnya kepesertaan jamsostek | NAKER/ BPJS KETENAGAKE RJAAN | % | 95.2 | 74 | Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | | | |
| SS | 1.3.2 (c) | Terpenuhinya akses pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas secara merata | Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos | DINSOS | % | | 100 | Meningkat menjadi 17,12% | 17.12% | - | - | 100 |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---------|-------|---------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | | Tercapainya peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial | Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos | DINSOS | % | | 100 | tidak ada target nasional | | | | |
| SS | 1.3.1 (d) | Tercapainya peningkatan pelayanan bantuan tunai secara merata | Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat | DINSOS | KPM | 15303 | 18769 | Menurun menjadi 2,8 juta | 2.8 juta | 1,733.00 | 463,538.50 | 33528 |
| TTC | | Meningkatnya prosentase yang terlindungi kesehatannya | Persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) | DINSOS | % | 17.67 | 33.91 | tidak ada target nasional | | | | |
| SS | | Meningkatnya pemenuhan kartu kesehatan secara adil dan merata dan pelayanan kesehatan yang maksimal | Jumlah rumah tangga yang menerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS) | DINSOS | % | | 162 | tidak ada target nasional | | | | 167 |
| NA | | Meningkatnya prosentase pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga tidak mampu | Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima pelayanan sosial | Bid. Perencanaan Bappeda | | | | tidak ada target nasional | | | | |
| SB | | Meningkatnya prosentase pendidikan dasar bagi warga tidak mampu | Persentase siswa miskin penerima bantuan untuk menempuh pendidikan dasar | DISDIKPORA | | 67.62 | 60.69 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTC | 1.4.1 (a) | Terpenuhinya sarana rumah bersalin dengan tingkat pelayanan yang baik | Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan | DKK | | 100 | 100 | Meningkat menjadi 70% | | | | |
| SS | 1.4.1 (b) | Terpenuhinya target imunisasi dasar lengkap usia 0-12 tahun | Persentase Anak Usia 0-12 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap | DKK | % | 98 | 96.19 | Meningkat menjadi 63%. | | | | |
| SS | | Terpenuhinya target imunisasi dasar lengkap usia 1 tahun | Persentase Anak Usia 1 tahun (12-23 bulan) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap | DKK | % | 98 | 99.65 | tidak ada target nasional | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-----------|--|--|-------------|--------|---------|-------|--|-------------------------------------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SB | 1.4.1 (d) | Mencapai akses yang merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat perkotaan | Cakupan Rumah tangga dengan Akses air bersih yang layak di perkotaan | DKK | % | 84.4 | 81 | Meningkat menjadi 100%. | 100% | - 1.70 | 3.17 | 90 |
| SB | | Mencapai akses yang merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat pedesaan | Cakupan Rumah tangga dengan Akses air bersih yang layak di pedesaan | DKK | % | 65.4 | 73.4 | Meningkat menjadi 100%. | 100% | 4.00 | 4.43 | 75 |
| SB | 1.4.1 (e) | Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata | Cakupan pelayanan sanitasi pemukiman yang layak | DKK | % | 74.5 | 80.24 | Meningkat menjadi 100%. | 100% | | | |
| TTT | 1.4.1 (f) | Mencapai akses terhadap cakupan rumah layak huni, aman, terjangkau, sehat | Cakupan rumah tidak layak huni | DINSOS | % | 4.34 | 6.5 | Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah. | 40% penduduk berpendapatan terbawah | | | |
| SS | 1.4.1 (g) | Terpenuhinya penduduk yang mendapatkan fasilitas pendidikan SD sederajat | Presentase APM SD sederajat | DINDIKPORA | % | 95.49 | 96.59 | Meningkat menjadi 94,78% | 94.78% | 0.55 | - 0.30 | 98,3 |
| SS | 1.4.1 (h) | Terpenuhinya penduduk yang mendapatkan fasilitas pendidikan SMP sederajat | Presentase APM SMP sederajat | DINDIKPORA | % | 83.73 | 87.15 | Meningkat menjadi 82,2% | 82.20% | 1.71 | - 0.83 | 88 |
| SS | 1.4.1 (j) | Terpenuhinya penduduk yang mendapatkan akta kelahiran | Presentase kepemilikan akta kelahiran | DINDUKAPIL | % | | 97.55 | Meningkat menjadi 77,4%. | 77.40% | | | |
| SS | | Tercapainya desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. | Cakupan desa tangguh bencana | BPBD | % | | 6.52 | Meningkat menjadi 39 daerah | | | | |
| TTC | | Terpenuhinya jumlah anggota TAGANA yang mumpuni untuk penanggulangan bencana | Jumlah TAGANA yg dikerahkan ke lokasi bencana | DINSOS | Orang | 110 | 92 | Meningkat menjadi 151 ribu | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|-----------|---|--|---------------|--------|---------|--------|-------------------------------------|-------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTC | | Terpenuhinya personel team pelayanan psikososial di kawasan bencana | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial | DINSOS | % | 100 | 100 | Meningkat menjadi menjadi 81,5 ribu | | | | |
| TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | | | | | | | | | | | | |
| SB | 2.1.1* | Terpenuhinya ketahanan pangan, ketersediaan pangan, strategi pangan regional | Tercapainya ketersediaan pangan utama | DISHANPAN | Ton | 110634 | 114477 | tidak ada dalam target nasional | | | | |
| SB | 2.1.1.(a) | Terdapatnya pengelola penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, khususnya untuk daerah dengan kemiskinan rendah. | Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita | DKK | | 6.56 | 4.01 | Menurun menjadi 17% | 17% | | | |
| NS | 2.1.2 (a) | Tercapainya pengurangan kelaparan khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari | BPS | | | | Menurun menjadi 8,5 % | 8.50% | | | |
| TTT | 2.2.1.(a) | Terpenuhinya target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | DKK | % | 33.3 | 30.6 | Menurun menjadi 28% | 28% | - 1.35 | - 0.43 | <20 |
| SS | 2.2.2* | Terpenuhinya target penurunan gizi buruk secara merata usia balita | Prevalensi gizi buruk pada anak balita (0-60 bulan) | DKK | % | 0.75 | 0.35 | Menurun | | | | <1 |
| SS | 2.2.2 (a) | Terpenuhinya target penurunan anemia ibu hamil | Prevalensi anemia pada ibu hamil | DKK | % | 5.04 | 14.87 | Menurun menjadi 28% | 28% | 4.92 | 2.19 | <23 |
| SS | 2.2.2 (b) | Tercapainya pemberian ASI eksklusif sampai usia dua tahun | Cakupan ASI Eksklusif | DKK | % | 83.1 | 82.2 | Meningkat menjadi 50% | 50% | - 0.45 | - 5.37 | 80 |
| SB | | Terpenuhinya produktivitas pertanian untuk konsumsi pangan | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat | DISTANPANGA N | % | 89.5 | 87.5 | Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; | | | | |
| TTC | | Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil | Persentase penguatan cadangan pangan | DISTANPANGA N | % | 8.8 | 10 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTT | | Meningkatnya produksi padi dari pertanian lokal | Produksi Padi (ton) *RADPG | DISTANPANGA N | % | 6.7 | 6.59 | tidak ada target nasional | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-------|--|--|---------------|------------------|------------|-----------|--|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTT | | Meningkatnya produksi jagung sebagai alternatif pangan non beras | Produksi jagung (ton) * | DISTANPANGA N | % | 4.3 | 4.5 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTC | | Meningkatnya produksi daging dari peternakan lokal | Produksi daging (Kg) statistik Kabupaten | DINNAKAN | Kg | 274428.498 | 615498 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTC | | Meningkatnya produksi telur secara merata di semua peternakan | Produksi telur (kg)*statistik Kabupaten | DINNAKAN | Kg | 2,787,578 | 7,364,796 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTT | | Meningkatnya produksi susu dari peternakan lokal | Produksi susu (lt) | DINNAKAN | Liter | 98990.25 | 226575 | tidak ada target nasional | | | | |
| SB | | Meningkatnya jumlah produksi ikan darat yang dikonsumsi warga | Tingkat Konsumsi ikan | DINNAKAN | kg/kapita /tahun | 16.2 | 19.7 | tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun | | | | |
| TTC | 2.3.2 | Meningkatnya pendapatan sebagai kontribusi terbesar rumah tangga usaha pertanian | Rata-rata pendapatan dari rumah tangga usaha pertanian | BPS | | | 102.17 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTT | 2.a.1 | Tercapainya perkembangan investasi semakin cepat | Perkembangan nilai investasi/laju investasi | BPS | | 2.74 | | tidak ada target nasional | 10 | - | - | 10 |
| TTT | | Tersedianya Kajian Potensi Sumberdaya | Presentase tersedianya kajian teknis potensi investasi | DPMPPTSP | % | | | tidak ada target nasional | 100 | - | - | 100 |
| TTC | | Terpenuhinya strategi pelayanan penanaman modal dan ketersediaan SDM | Presentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih | DPMPPTSP | % | | 100 | tidak ada target nasional | 100 | - | - | 100 |
| NA | | Tersedianya informasi peluang usaha di sektor atau unggulan terbesar | Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor bidang unggulan | DPMPPTSP | % | | | tidak ada target nasional | 100 | - | - | 100 |
| NA | | Adanya penilaian permohonan serta penerbitan izin prinsip & izin prinsip penanaman modal | Presentase peningkatan penerbitan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) | DPMPPTSP | % | | | tidak ada target nasional | | | | |
| NA | | Adanya penilaian permohonan serta penerbitan izin usaha penanaman modal | Persentase peningkatan izin usaha penanaman modal (IUPM) | DPMPPTSP | % | | | tidak ada target nasional | | | | |
| TTT | | Tercapainya realisasi peningkatan investasi untuk penanaman modal | Presentase peningkatan nilai realisasi investasi tipe 1 dan tipe 2 | DPMPPTSP | % | | 40 | tidak ada target nasional | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|--|-----------|---|---|---------------|--------------|---------|-------|---------------------------|------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTT | | Tersedianya perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa | Presentase peningkatan kepemilikan investasi | DPMPSTP | % | | 40 | tidak ada target nasional | | | | |
| TTC | 2.c.1 | Adanya realisasi penyerapan beras dan gabah Perum Bulog | Harga gabah di tingkat petani (GKP) *RADPG | DINTANPANG AN | Rp/Kg | 3800 | 4300 | tidak ada target nasional | | | | |
| TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA | | | | | | | | | | | | |
| SB | 3.1.1* | Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | DKK | per kilo mil | 27.42 | 67.45 | Menurun menjadi 306 | 306 | 20.02 | 39.76 | 95 |
| SS | 3.1.2* | Terpenuhi tenaga kesehatan yang terampil dan cepat bertindak | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil | DKK | % | 94 | 100 | Meningkat menjadi 95% | 95% | | | |
| SS | 3.1.2 (a) | Terpenuhi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan | Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | DKK | % | 100 | 100 | Meningkat menjadi 85 % | 85% | - | - 2.50 | 100 |
| SS | 3.2.1* | Menurunnya angka kematian balita | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup | DKK | Per mil | 26.89 | 15.23 | Menurun | | - 5.83 | - | 15,0 |
| SS | 3.2.2* | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani (%) | DKK | % | 100 | 100 | Meningkat | | - | - | 9 |
| | | | Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | DKK | % | 11.16 | 9.54 | Menurun | | | | |
| SB | 3.2.2 (a) | Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 | Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | DKK | Per mil | 16.82 | 13.2 | Menurun menjadi 24 | 24 | - 1.81 | 1.80 | 10 |
| SB | 3.2.2 (b) | Terdapatnya Data berisi mengenai jumlah desa yang menjalani UCI (Universal Child Immunization) atau seluruh anak di desa itu telah diimunisasi | Presentase Universal Child Immunisation (UCI) Desa dan/atau Kelurahan | DKK | % | 99.65 | 99.65 | Meningkat menjadi 95% | 95% | - | - 0.78 | 100 |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-----------|--|---|-------------|-------------|---------|-------|---|--------|--------|---------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTC | 3.3.1 | Mengakhiri epidemi AIDS , melakukan pengawasan serta sosialisasi | Penemuan penderita HIV | DKK | | 0.04 | 0.004 | Menurun menjadi <0,5% | <0,5 | - 0.02 | 0.08 | <0,05 |
| TTC | 3.3.2 | Mengakhiri epidemi tuberkulosis dan melakukan penyuluhan kesehatan | Penemuan penderita Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk | DKK | Per 100.000 | | 553 | Menurun menjadi 245 | 245 | 276.50 | - 51.33 | 170 |
| SS | 3.3.3 (a) | Mengakhiri epidemi malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya | Penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk | DKK | Per Mil | 0.01 | 25.12 | Menurun | | 12.56 | - | <1 |
| SS | 3.3.5* | Mengakhiri penyakit kusta dan mencegah penularannya | Angka Penemuan Kasus Baru Kusta | DKK | Per Mil | 0.8 | 0.66 | Menurun | | - 0.07 | - | <1 |
| TTC | 3.4.1 | Mencegah atau memerangi hepatitis penyuluhan sanitasi lingkungan | Penemuan penderita Diabetes Melitus (DM) | DKK | % | | 56.78 | Menurun (tdk ada target nasional) | | - | - | 100 |
| TTT | | Tercapainya pemenuhan program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara | Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang di deteksi dini kanker leher rahim dan payudara | DKK | % | | 5.4 | Menurun (tdk ada target nasional) | | | | |
| SB | 3.4.1 (b) | Terpenuhinya data masyarakat penderita hipertensi | Penemuan penderita hipertensi | DKK | % | | 36.76 | Menurun menjadi 24,3% | 24.30% | - | - 2.08 | 100 |
| SS | 3.4.2 (a) | Bertambahnya Puskesmas untuk pelayanan kejiwaan | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (masuk ke kementerian kesehatan) | DKK | Unit | 2 | 25 | Meningkat menjadi 280 | 280 | 11.50 | 42.50 | 26 |
| NA | 3.5.1 (b) | Terpenuhinya data secara akurat, pecandu narkoba yang sudah direhabilitasi | mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi | BNN | Orang | | | Meningkat(tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 3.5.1 (c) | Terpenuhinya data secara akurat, pecandu NAPZA yang sudah direhabilitasi | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai standart pelayanan | BNN | Orang | | 12 | Meningkat menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti menjadi 4.319 | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-----------|--|---|-------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTC | | Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi NAPZA | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai standart pelayanan | BNN | Orang | | 37 | Meningkat menjadi 85 % | 85% | | | |
| TTC | | Terwujudnya penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba | Jumlah advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah dan swasta | BNN | Advokasi | | 3 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Terselenggaranya kegiatan P4GN di masyarakat umum | Jumlah Informasi P4GN yang disampaikan kepada keluarga, pelajar, pekerja dan kelompok masyarakat | BNN | Infomasi | | 18 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Meningkatnya jumlah Lembaga Masyarakat anti narkoba di masyarakat atau instansi pemerintah | Jumlah program Pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah, dunia usaha, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan | BNN | Pemberda yaan | | 4 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Terpenuhinya Rencana Aksi P4GN dalam Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba | Terwujudnya kemandirian masyarakat dan Stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN | BNN | Angka Indeks | | 2.6 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 3.6.1 | Tercapainya penurunan angka kematian karena kecelakaan | Jumlah orang yang meninggal dunia karena kecelakaan atau lalu lintas | Polres | Orang | 114 | 58 | Menurun | | | | |
| TTC | | Tercapainya penurunan luka berat karena kecelakaan lalu lintas | Jumlah orang yang cedera/luka berat kecelakaan jalan atau lalu lintas | Polres | Orang | 4 | 2 | Menurun | | | | |
| SS | 3.7.1 (a) | Terpenuhinya data pengguna kontrasepsi | Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (all methods) pada perempuan usia 15-49 | DPPKBPPPA | % | 81.66 | 82.73 | Meningkat menjadi 66% | 66% | | | |
| SS | | Terdatanya dengan akurat peserta KB aktif | Presentase kepersertaan KB aktif | DPPKBPPPA | % | 83.2 | 83.42 | Meningkat | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|--|------------|--|--|-------------|--------|---------|-------|---------------------------------------|--------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | 3.7.2 (b) | Peningkatan pengguna kontrasepsi jangka panjang | Presentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang | DPPKBPPPA | % | 51.327 | 48.05 | Meningkat menjadi 23,5% | 23.50% | | | |
| SS | 3.7.2* | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan | Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th) | DPPKBPPPA | % | 29.43 | 29.43 | Menurun menjadi 38 | 38 | | | |
| SB | 3.8.1(a) | Terpenuhinya pelayanan KB | Presentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmeetneed | DPPKBPPPA | % | 5.5 | 7.19 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Terpenuhinya pelayanan kesehatan | Unmeet need pelayanan kesehatan | DPPKBPPPA | | 9.86 | 5.1 | Menurun menjadi 9,91% | 9.91 | | | |
| SS | | Mengakhiri dan memerangi HIV lebih dini | Persentase angka kasus HIV yang diobati | DKK | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - | - | 100 |
| SB | | Berkurangnya penduduk yang terkena TB | Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate) | DKK | % | 81.45 | 85 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | 1.78 | - | 90 |
| SS | 3.8.2. (a) | Tercapainya penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan | Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan | DKK | % | 100 | 100 | Meningkat menjadi minimal 95% | 95% | | | |
| | 3.a.1* | Berkurangnya warga yang merokok pada usia dini | Persentase merokok pada penduduk usia <= 18 tahun | BPS | % | 5.99 | 6.89 | Menurun menjadi 5,4% | 5.40% | | | |
| TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT | | | | | | | | | | | | |
| TTC | 4.1.1* | Angka kelulusan SD/MI | Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada tingkat 2/3, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis kelamin | Dindikpora | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Angka kelulusan SMP/MTs | | Dindikpora | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Angka Kelulusan SMA/ SMK/SMALB/MA | | Dindikpora | % | 99.86 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-----------|--|---|-----------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | 4.1.1 (a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | Dindikpora | % | 86.11 | 92.2 | Meningkat menjadi 84,2% | 84.20% | | | |
| SS | 4.1.1 (b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | Dindikpora | % | 88.68 | 87.85 | Meningkat menjadi 81% | 81% | | | |
| NA | 4.1.1 (c) | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B | Dindikpora | % | 63.33 | 0 | Meningkat menjadi 84,6% | 84.60% | | | |
| SB | 4.1.1 (d) | Presentase APK SD sederajat | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat | Dindikpora | % | 109.43 | 112.13 | Meningkat menjadi 114,09% | 114.09% | | | |
| SB | 4.1.1 (e) | Presentase APK SMP sederajat | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat | Dindikpora | % | 97.17 | 95.4 | Meningkat menjadi 106,94% | 106.94% | | | |
| SB | 4.1.1 (f) | APK SMA/Sederajat | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat | Dindikpora | % | 60.76 | 57.06 | Meningkat menjadi 91,63% | 91.63% | | | |
| SB | 4.2.2 (a) | APK PAUD/ TK | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Dindikpora | % | 67.66 | 68.13 | Meningkat menjadi 77,2% | 77.00% | | | |
| TTC | 4.3.1 | Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B | Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin | Dinas Dikpora / Dinas Naker | % | 6.67 | 7.3 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Persentase kecamatan memiliki PKBM dan TBM | | Dinas Dikpora | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | BPS | | 11.89 | 0 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|---------|--|--|-------------|--------------|---------|-------|---------------------------------------|-----------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SB | | Rata-rata Lama Sekolah | | BPS | | 6.52 | 0 | Meningkat menjadi 8,8 tahun | 8.8 tahun | | | |
| TTT | | Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun | | DINAS ARPUS | % | 63.13 | 83.1 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Jumlah koleksi buku yang tersedia | | DINAS ARPUS | EKSEMPLAR | 28560 | 49184 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| NA | | Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan (gedung & koleksi) | | DINAS ARPUS | | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Persentase perpustakaan desa yang sudah dilakukan pembinaan | | DINAS ARPUS | % | 0.05 | 0.16 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Jumlah sumber daya manusia Perpustakaan yang telah mengikuti bintek | | DINAS ARPUS | perpustakaan | 25 | 24 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Persentase Peminjam Buku Perpustakaan terhadap jumlah pengunjung | | DINAS ARPUS | % | 74 | 83 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Persentase perpustakaan yang aktif | | DINAS ARPUS | PERPUSTAKAAN | 2 | 5 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | 4.4.1* | Jumlah Pengelola SID yang dilatih | Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi | Dinpermades | DESA | | 172 | Meningkat | | | | |
| SB | 4.5.1 * | Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di SD/SDLB/ MI/Paket A | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) | Dindikpora | % | | 0.96 | Meningkat | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|-----------|---|--|-------------|--------|---------|-------|-------------------------|--------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | | Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di SMP/SMPLB/ MTs/Paket B | SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT | Dindikpora | % | | 1.07 | Meningkat | | | | |
| SB | | Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SD/SDLB/ MI/Paket A | | Dindikpora | % | 0.9 | 0.94 | Meningkat | | | | |
| SS | | Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SMP/SMPLB/ MTs/Paket B | | Dindikpora | % | 1.04 | 1.04 | Meningkat | | | | |
| SB | | Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SMA/SMK/ SMALB/MA/Paket C | | Dindikpora | % | 1.15 | 1.13 | Meningkat | | | | |
| SS | 4.6.1 (a) | Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | Dindikpora | % | 98.1 | 98.48 | Meningkat menjadi 96,1% | 96.10% | | | |
| SS | 4.6.1.(b) | Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun | | Dindikpora | % | 98.13 | 98.71 | Meningkat | | | | |
| SB | 4.a.1 | Presentase SD Negeri yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | Dindikpora | % | | 64.32 | Meningkat | | | | |
| SB | | Presentase SMP Negeri yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana | | Dindikpora | % | | 70 | Meningkat | | | | |
| SB | 4.c.1 | Presentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik | Dindikpora | % | 84.68 | 70 | Meningkat | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|-----------|---|---|-------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|----------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SB | | Presentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik | | Dindikpora | % | 88.46 | 40 | Meningkat | | | | |
| SS | | Persentase pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4 | | Dindikpora | % | 93.01 | 0 | Meningkat | | | | |
| TUJUAN 5: MENCAPI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | |
| NA | 5.1.1* | Rasio OPD yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja SKPD | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | DPPKBPPPA | % | 2 | | bertambah sebanyak 16 | 16 | | | |
| SB | 5.2.1* | Rasio kekerasan dalam rumah tangga | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | DPPKBPPPA | | 1:2401 | 1:13500 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 5.2.2 (a) | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | DPPKBPPPA | % | 84 | 100 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | | DPPKBPPPA | % | 100 | 100 | Meningkat menjadi 70% | 70% | | | |
| SS | 5.3.1* | Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | DPPKBPPPA | % | | 63.49 | Meningkat menjadi 21 tahun | 21 tahun | | | |
| SS | 5.5.1 * | Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah | DPPKBPPPA | | 31.11 | 31.11 | Meningkat | | | | |
| SB | 5.6.1 (a) | Presentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) | DPPKBPPPA | | 9.86 | 7.19 | Menurun menjadi 9,9% | 9.90% | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|------------|---|--|-------------|--------|---------|-------|---|--------|--------|------|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | 5.6.1 (b) | Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | DPPKBPPPA | | 51.327 | 100 | Meningkat menjadi 85% | 85% | | | |
| PILAR EKONOMI | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 7 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA | | | | | | | | | | | | |
| TTC | 7.1.1* | Terpenuhinya penduduk yang menikmati listrik | Rasio elektrifikasi | BPS | % | | 92.24 | Meningkat menjadi 96,6% | 96.60% | - | 0.73 | 96,0 |
| TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA | | | | | | | | | | | | |
| SB | 8.1.1. (a) | PDRB per kapita | PDRB per kapita (juta rupiah) | BPS | juta | 21.59 | 24.8 | Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta | | | | |
| SB | 8.3.1. (a) | Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, | Presentase tenaga kerja formal | BPS | % | 22.73 | 21.83 | 51% | 51% | - 0.45 | 4.86 | 22,50 |
| SS | 8.5.2* | Menurunnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | BPS | % | 4.08 | 4.25 | Menurun (tidak ada target nasional) | | 0.09 | - | 2,76 |
| SS | | Terdatanya indikator atau tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | BPS | % | 86.21 | 89 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | 1.40 | - | 75.00 |
| SS | | Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | DISNAKER | % | 81.7 | 80 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - 0.85 | - | 45.00 |
| SB | | Terdatanya dan terpenuhinya pencaker yang ditempatkan | Persentase besaran pencaker yang ditempatkan. | DISNAKER | % | 79.7 | 75 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - 2.35 | - | 69.00 |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|--|------------|--|---|-----------------|--------|---------|---------|---------------------------------------|------|---------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SB | | Menggalakkan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan | Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha | DISPERINDAG KOP | % | | 44 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | - | - | 34.00 |
| SS | 8.5.2 (a) | Terdatanya jumlah penduduk setengah pengangguran | Tingkat setengah pengangguran | BPS | % | 6.36 | 3.7 | Menurun | | - 1.33 | - | 3.63 |
| SB | 8.6.1* | Terdatanya naker terampil pada bidang tertentu | Persentase tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | DISNAKER | Orang | 560 | 416 | Meningkat | | - 72.00 | - | 60.00 |
| TTC | 8.7.1 | Terdatanya di semua wilayah jumlah anak yang bekerja | Persentase dan jumlah anak usia 15-17 tahun, yang bekerja | BPS | % | 27.18 | 16.65 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| NA | 8.8.1 | Menurunnya atau tidak adanya pelanggaran norma keteagakerjaan | Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan | DISNAKER | | | | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 8.9.1. (a) | Terpenuhinya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara setiap tahunnya di Kabupaten Temanggung | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | DINBUDPAR | Orang | 435 | 107 | Meningkat | | | | |
| SS | 8.9.1. (b) | Terpenuhinya jumlah wisatawan nusantara setiap tahunnya di Kabupaten Temanggung | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | DINBUDPAR | Orang | 395717 | 491037 | Meningkat | | | | |
| TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN | | | | | | | | | | | | |
| TTC | 9.1.1 | Peningkatan infrastruktur jembatan | Presentase jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang | DPUPKP | % | 84 | 90 | Meningkat | | | | |
| TTC | 9.1.1. (a) | Peningkatan infrastruktur jalan | Presentase jalan kabupaten kondisi baik | DPUPKP | % | 70 | 82.42 | Meningkat | | 6.21 | - | 85.50 |
| TTC | 9.1.2 | Tepenuhinya ijin trayek | Jumlah ijin trayek yang melayani pedesaan | DISHUB | Unit | 612 | 612 | Meningkat | | - | - | 85.50 |
| TTC | | Terdapatnya informasi data jumlah penumpang yang masuk terminal | Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal | DISHUB | Orang | 9587052 | 6260332 | Meningkat | | | | |
| TTC | 9.2.1* | Adanya data dan pengelolaan industri pengolahan | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB | BPS | % | 26.47 | 27.05 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 9.2.1.(a) | Terpenuhinya pertumbuhan industri manufaktur | Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan | BPS | | 5.6 | 5.08 | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|------------|---|--|---------------------|--------|---------|-------|---------------------------------------|--------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SB | 9.2.2* | Terpenuhinya dengan seimbang jumlah karyawan pada sektor industri | Proporsi tenaga kerja sektor industri terhadap total tenaga kerja | BPS | | 26.97 | 13.78 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | | Tercapainya jumlah naker di sektor industri | Jumlah tenaga kerja di sektor industri | BPS | | 11448 | 58075 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | 9.3.1* | Tercapainya peningkatan kualitas produk yang sudah melalui pelatihan teknis, peningkatan mutu produk dan design | Jumlah produk OVOP | DISPERINDAG KOP | Unit | | 3 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 9.3.2* | Adanya data atau informasi peningkatan usaha mikro, kecil, menengah (metadata) | Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha | DISPERINDAG KOP | % | | 44 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 9.4.1.(a) | Penurunan jumlah emisi | Jumlah emisi karbondioksida (CO2e) | DLH | | | | berkurang, mendekati 26% | 26.00% | | | |
| NA | | Peningkatan status mutu air | Informasi status mutu air (SPM) | DLH | | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| NA | | Peningkatan status mutu udara ambien | Persentase informasi status mutu udara ambien (SPM) | DLH | | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Adanya informasi atau aduan dari warga | Presentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | DLH | % | | 100 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 9.5.1 | Peningkatan belanja modal agar tetap stabil | Alokasi APBD untuk penelitian dan pengembangan (juta) | Bag Litbang Bappeda | juta | 100 | 1200 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | 9.c.1. (b) | Berkembangnya teknologi informasi | Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan teknologi informasi terintegrasi | DINKOMINFO | % | 50 | 50 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Peningkatan jumlah desa yang terpenuhi akses jaringan internet | Rasio Desa dan Kelurahan yang terhubung dengan jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten | DINKOMINFO | % | 4.84 | 12.46 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|------------|--|--|--------------|--------|---------|-------|---|-------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| TTT | | Peningkatan perangkat desa yang terpenuhi akses jaringan internet | Rasio Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten | DINKOMINFO | % | 35 | 69.12 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Terpenuhinya jaringan wifi di area publik | Rasio Area Publik yang terhubung dengan jaringan Wifi Pemerintah Daerah Kabupaten | DINKOMINFO | % | 35 | 45 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Pengelolaan dan peningkatan sistem informasi | Rasio Sistem Informasi E-Government yang berfungsi optimal | DINKOMINFO | % | | 28.78 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Terpenuhinya layanan masyarakat | Rasio subdomain desa yang menggunakan domain desa.id | DINKOMINFO | | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTT | | Terpenuhinya layanan informasi | Rasio Sistem Informasi E-Government yang terintegrasi | DINKOMINFO | | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA | | | | | | | | | | | | |
| NA | 10.1.1* | Adanya pemerataan pendapatan | Indeks Gini | BPS | | | | Menurun menjadi 0,36 | 0.36 | | | |
| SB | 10.1.1.(a) | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | BPS | % | 11.76 | 11.46 | Menurun menjadi 7-8% | 7-8 % | | | |
| NA | 10.1.1.(d) | Meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri | prosentase desa/jumlah desa yang mempunyai predikat desa maju dan mandiri | DINPERMADE S | | | | Meningkat paling sedikit 2.000 desa | | | | |
| SS | 10.1.1 (e) | Terpenuhinya tingkat perekonomian | Pertumbuhan Ekonomi | BPS | | 5.21 | 5 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | | PDRB per kapita | PDRB Perkapita | BPS | | 21.59 | 24.92 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 10.3.1 | Tercapainya pemenuhan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan | Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan | DPPKBPPPA | | | 100 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | 10.4.1.(b) | Terpenuhinya secara merata jamsostek | % besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek | DISNAKER | | 95.2 | 74 | Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|---|-------------|---|--|----------------|--------|---------|----------|---------------------------------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| | | | | | | | | juta | | | | |
| TUJUAN 17 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA | | | | | | | | | | | | |
| TTT | 17.5.1 | 1. Persentase pelayanan perizinan online | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang | DPMPTSP | | 25 | 21.5 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | 2. Persentase perizinan yang bebas calo | | DPMPTSP | | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | 3. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu | | DPMPTSP | | 95 | 57.53 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| | 17.11.1 | | Bagian negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global | | | | | | | | | |
| TTC | | Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan | | Disperindagkop | % | 2.08 | 7.52 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB | | BPS | | 26.53 | 27.13 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | | BPS | | 20.32 | 20.38 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| TTC | 17.11.1 (a) | Nilai Ekspor non migas | Pertumbuhan ekspor produk non migas | Disperindagkop | | | 96578151 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| PILAR HUKUM | | | | | | | | | | | | |
| SS | 16.1.2.(a) | Terselesaikannya konflik sosial dengan baik | Persentase penanganan konflik sosial | KESBANGPOL | | | | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 16.1.3.(a) | Menurunnya atau tidak adanya KDRT pada perempuan dan anak | Rasio KDRT pada perempuan dan anak | DPPKBPPPA | rasio | 1:2401 | 1:1450 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|------------|--|---|-------------------|------------------|---------|------|---------------------------------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | 16.2.1 | Terlindungnya anak korban kekerasan dan terpenuhinya pemulihan psikologis secara sempurna | Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | DPPKBPPPA | % | 100 | 100 | Menurun (tidak ada target nasional) | | | | |
| NB | 16.2.1.(b) | Tidak adanya lagi perempuan dan anak korban kekerasan | Presentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | DPPKBPPPA | % | | 0.04 | Menurun | | | | |
| SB | 16.6.1* | Bertambahnya PNS yang studi lanjut ke jenjang lebih tinggi | Persentase PNS lulusan S2/S3 | BKPSDM | % | 4.1 | 4.7 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Bertambahnya karyawan yang mendapat kenaikan jabatan | Promosi jabatan struktural secara terbuka | BKPSDM | | 4 | 5 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | 16.6.1 (a) | Adanya standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan | Laporan Keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian | BPPKAD | | WTP | WTP | Meningkat menjadi 60% | 60% | | | |
| NA | 16.6.1.(c) | Tercapainya peningkatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparans dan akuntabilitas | Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | Pembangunan Setda | | | | Meningkat menjadi 80% | 80% | | | |
| SB | 16.6.2.(a) | Adanya penilaian terhadap tingkat kepatuhan standart pelayanan unit | Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap standar pelayanan | ORTALA SETDA | predikat/in deks | 15.34 | 56 | Meningkat menjadi 80% | | | | |
| SB | | Terpenuhinya UPP bersertifikat | Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat | ORTALA SETDA | % | | 3 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Tercapainya pelayanan publik sebagai implikasi dan fungsi dari aparat | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat | ORTALA SETDA | indeks | 75 | 82 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Tercapainya target dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat | Terselesaikannya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%) | ORTALA SETDA | % | 80 | 84 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan | DPMPSTP | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|------------|---|---|--------------------|--------------|---------|-------|---------------------------------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | | Informasi jumlah aduan yang sudah selesai | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | DPMPSTP | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | | Informasi jumlah gugatan yang sudah diselesaikan | 2. Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan | DPMPSTP | % | 100 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Tercapainya jumlah penduduk yang mempunyai e-KTP | Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP | DINDUKCAPIL | | 0.9 | 0.9 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Pemenuhan jumlah akta kelahiran | Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran | DINDUKCAPIL | % | | 97.54 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| NS | | Adanya rencana aksi | Implementasi Aksi PPK | BAPPEDA | | | | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Adanya sistem pengendalian dalam suatu organisasi | Jumlah OPD yang menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | INSPEKTORAT | OPD | 10 | 7 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Adanya indikator kerja untuk pencapaian target | Tingkat Kematangan/Maturitas SPIP | INSPEKTORAT | | | 3.045 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | | Adanya internal audit sebagai pencapaian kapabilitas | Tingkat Kapabilitas APIP | INSPEKTORAT | Level | 1 | 2 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | | Adanya ketertiban dan penegakan hukum | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | SATPOL PP | % | 95.24 | 100 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SS | 16.9.1. | Terealisasinya kepemilikan akta kelahiran | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | DINDUKCAPIL | % | | 6.38 | Meningkat (tidak ada target nasional) | | | | |
| SB | 16.9.1.(b) | Peningkatan pelayanan pengurusan akta kelahiran | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | DINDUKCAPIL | % | 1.78 | 64 | Meningkat menjadi 85% | 85% | | | |
| SS | 16.10.2* | Adanya monitoring secara rutin | Presentase PPID badan publik yang aktif | DINKOMINFO | | | 4 | Meningkat | | | | |
| SS | | Peningkatan penyiaran yang bermanfaat bagi masyarakat | Persentase (%) kegiatan lembaga penyiaran yg sesuai dgn ketentuan perundang-undangan yg berlaku | Bagian Humas Setda | program siar | 100 | 100 | Meningkat | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|----|---|--|--------------------|----------------------|---------|------|------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| SS | | Peningkatan bidang penyiaran | Persentase (%) Pelayanan Pengaturan Bidang Penyiaran | Bagian Humas Setda | % | 100 | 100 | Meningkat | | | | |
| SS | | Informasi secara rutin ke masyarakat | penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat per bulan | DINKOMINFO | kali/bulan | 1 | 12 | Meningkat | | | | |
| SB | | Informasi data yang akurat | Jumlah lembaga, komunitas, kelompok organisasi masyarakat yang aktif melakukan diseminasi informasi | DINKOMINFO | % | | 5 | Meningkat | | | | |
| SB | | Informasi dalam pemberitaan | Jumlah berita dan informasi yang bersifat lokal maupun nasional yang disampaikan kepada masyarakat | DINKOMINFO | kali/hari | | 4 | Meningkat | | | | |
| SB | | Adanya program penyiaran yang tersalurkan | program dan acara lembaga penyiaran sesuai dengan P3SPS (Pedoman Program Penyiaran Standar Program Siaran) dan jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti | DINKOMINFO | % | | 80 | Meningkat | | | | |
| SS | | Tercapainya peningkatan sarana prasarana website | Persentase peningkatan pengunjung website | Bagian Humas Setda | pengunjung/buku tamu | 25 | 90 | Meningkat | | | | |
| NA | | Perwujudan perlindungan dan pemenuhan HAM secara adil | Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender | Bagian Hukum Setda | | | | Meningkat | | | | |

| AWAL | NO | TARGET | INDIKATOR | SUMBER DATA | SATUAN | CAPAIAN | | TARGET TPB | | RATE | | TARGET 2023 |
|------|----|--|--|--------------------|--------|---------|------|------------|------|------|-----|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2017 | TARGET | 2023 | BAU | TPB | |
| NA | | Adanya bukti yang cukup dalam penyelesaian pelanggaran HAM | Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual | Bagian Hukum Setda | | | | Meningkat | | | | |
| SS | | Terpenuhinya secara Konsensual/ Kompromi Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif | Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi | Bagian Hukum Setda | | | 80 | Meningkat | | | | |
| NA | | Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | Bagian Hukum Setda | | | | Meningkat | | | | |
| NA | | Terdapatnya informasi yang akurat | Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan | Bagian Hukum Setda | | | 6 | Meningkat | | | | |

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung, 2018

5.3. Skenario Proyeksi Keuangan Kabupaten Temanggung

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Laju investasi menunjukkan perkembangan investasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.9. Laju Investasi 2014-2017

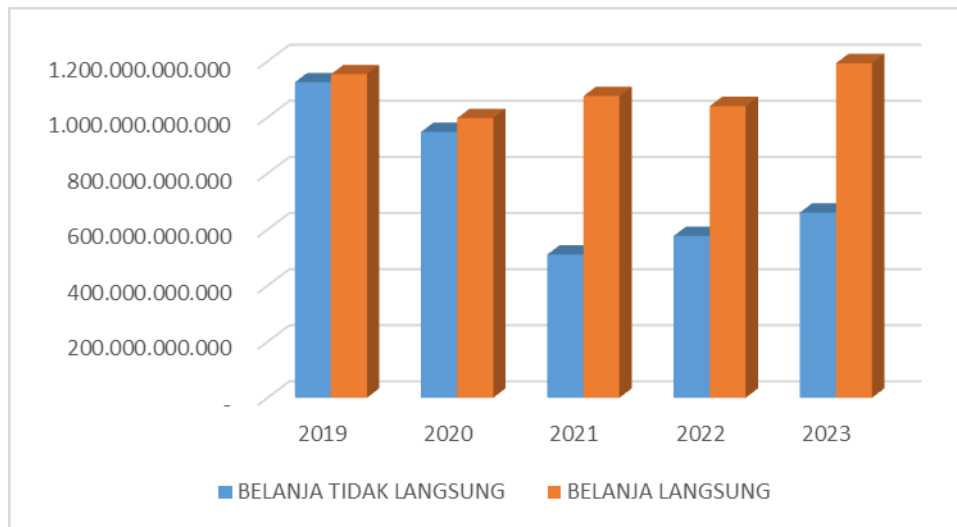
| Tahun | Nilai Investasi (Rp. milyar.) | Laju Investasi (%) |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| 2014 | 85,001 | 25,00 |
| 2015 | 124,679 | 47,00 |
| 2016 | 147,182 | 18,05 |
| 2017 | 164,650 | 11,87 |

Berdasarkan tabel tersebut, laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014 sampai 2017 cukup fluktuatif. Laju paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 47 %, kemudian melambat menjadi 18,05 % dan 11,87 % pada dua tahun terakhir.

Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dan menurut jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dan menurut jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

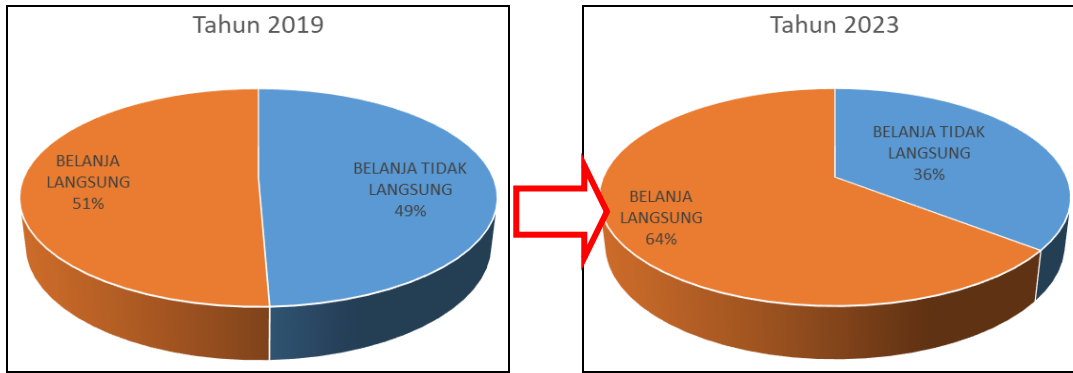
Secara ideal, porsi alokasi belanja tidak langsung terutama untuk membiayai belanja pegawai daerah tidak terlalu tinggi, serta alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal daerah yang semakin meningkat akan mempercepat terciptanya wujud dan jenis pelayanan publik yang semakin baik, optimal dan efektif. Untuk lebih jelasnya, komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun perencanaan yaitu Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.



Gambar 5.1. Grafik Komposisi Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

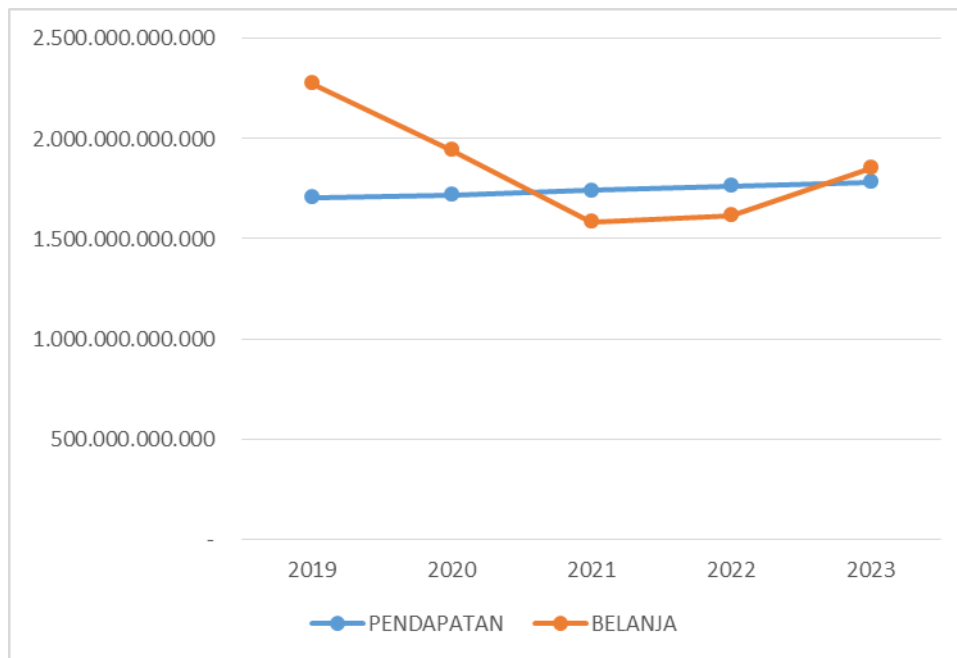
Dari grafik di atas, terlihat bahwa belanja tidak langsung semakin menurun pada 3 (tiga) tahun pertama dan 3 (tiga) tahun terakhir porsi alokasi belanja langsung semakin meningkat sehingga pelayanan publik ke masyarakat semakin baik, optimal dan efektif.

Persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung di awal dan akhir perencanaan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 5.2. Grafik Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Temanggung di Awal dan Akhir Perencanaan

Bila dibandingkan antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 terdapat defisit anggaran pada 2 (dua) tahun pertama yang cukup besar sedangkan di tahun ketiga dan keempat direncanakan surplus anggaran. Untuk tahun ke lima terjadi defisit anggaran lagi namun tidak terlalu besar, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 5.3. Grafik Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas, defisit anggaran yang cukup besar di tahun pertama dan kedua dapat dikurangi dengan menggeser sebagian belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dapat dilaksanakan di tahun ketiga dan keempat.

Belanja Daerah dalam pelaksanaannya dibagi dalam beberapa urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program/ kegiatan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.10. Tabel Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

| NO | URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH | KONDISI AWAL | BELANJA DAERAH (Rp.) | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | BELANJA | 1.766.724.703.572 | 1.705.592.427.996 | 1.806.288.106.500 | 1.915.112.843.000 | 2.032.922.001.000 | 2.160.678.909.000 |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.107.398.574.436 | 1.114.971.567.100 | 1.147.994.870.304 | 1.188.394.106.804 | 1.209.667.907.539 | 1.291.472.174.435 |
| | Belanja Pegawai | 664.754.547.441 | 730.487.994.725 | 730.488.202.429 | 747.488.406.429 | 747.487.674.664 | 767.487.674.560 |
| 101 | Pendidikan | | 431.564.199.867 | 437.373.073.481 | 439.920.946.688 | 444.036.033.994 | 448.212.847.608 |
| 213 | Kepemudaan Dan Olah Raga | | 5.555.000.000 | 5.430.000.000 | 5.430.000.000 | 5.430.000.000 | 6.000.000.000 |
| 102 | Kesehatan | | 3.758.500.000 | 3.797.500.000 | 4.075.000.000 | 4.100.000.000 | 4.740.000.000 |
| 103 | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | 22.000.000.000 |
| 105 | Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | | 1.400.347.875 | 1.400.347.875 | 1.400.347.875 | 1.400.347.875 | 6.400.347.875 |
| 106 | Sosial | | 13.349.612.500 | 20.127.520.000 | 20.197.052.500 | 20.266.585.000 | 20.369.150.000 |
| 207 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | 311.462.112.000 | 328.968.600.000 | 339.693.600.000 | 355.743.600.000 | 379.750.000.000 |
| 209 | Perhubungan | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 216 | Kebudayaan | | 200.000.000 | 416.500.000 | 416.500.000 | 416.500.000 | 416.500.000 |
| 217 | Perpustakaan | | 50.000.000 | 50.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
| 302 | Pariwisata | | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 5.000.000.000 | 6.000.000.000 | 7.000.000.000 |
| 303 | Pertanian | | 3.000.000.000 | 3.325.000.000 | 5.950.000.000 | 6.075.000.000 | 7.330.302.000 |
| 306 | Perdagangan | | 833.000.000 | 771.000.000 | 848.000.000 | 853.000.000 | 858.000.000 |
| 406 | Administrasi Pemerintahan | | 10.250.000.000 | 12.525.000.000 | 12.525.000.000 | 16.525.000.000 | 40.250.000.000 |
| | | | | | | | |
| B | BELANJA LANGSUNG | 659.326.129.136 | 590.620.860.896 | 658.293.236.196 | 726.718.736.196 | 823.254.093.461 | 869.206.734.565 |
| 101 | Pendidikan | 24,710,636,500 | 88.957.000.000 | 139.666.800.000 | 157.298.700.000 | 157.883.690.000 | 158.190.704.000 |
| 102 | Kesehatan | 199,881,562,000 | 226.130.871.900 | 236.923.008.900 | 252.733.008.900 | 340.487.311.165 | 268.298.444.519 |
| 103 | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 50,589,190,090 | 52.900.600.000 | 52.000.000.000 | 67.220.000.000 | 73.951.390.000 | 135.670.000.000 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 104 | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | 26,793,627,000 | 21.532.500.000 | 19.010.000.000 | 24.010.000.000 | 24.010.000.000 | 40.050.000.000 |
| 105 | Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | 2,938,585,000 | 3.300.000.000 | 3.175.000.000 | 3.175.000.000 | 3.175.000.000 | 3.175.000.000 |
| 106 | Sosial | 5,895,590,450 | 10.700.000.000 | 8.270.000.000 | 8.495.000.000 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 |
| 201 | Tenaga Kerja | 1,765,000,000 | 2.125.000.000 | 2.063.500.000 | 2.065.000.000 | 2.073.500.000 | 2.082.500.000 |
| 202 | Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak | 482,165,500 | 400.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 203 | Pangan | 300,000,000 | 2.910.000.000 | 2.960.000.000 | 3.070.000.000 | 3.215.000.000 | 3.345.000.000 |
| 204 | Pertanahan | 8,240,000,000 | 700.000.000 | 25.000.000 | 700.000.000 | 35.000.000 | 25.000.000.000 |
| 205 | Lingkungan Hidup | 8,854,452,500 | 9.590.000.000 | 9.390.000.000 | 9.445.000.000 | 9.590.000.000 | 9.885.000.000 |
| 206 | Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil | 3,051,451,000 | 3.612.074.000 | 3.612.074.000 | 3.612.074.000 | 3.612.074.000 | 3.612.074.000 |
| 207 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 1,613,790,000 | 1.750.000.000 | 1.325.000.000 | 1.525.000.000 | 1.525.000.000 | 1.525.000.000 |
| 208 | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 1,675,000,000 | 2.184.000.000 | 1.652.000.000 | 1.739.000.000 | 1.826.000.000 | 1.913.000.000 |
| 209 | Perhubungan | 4,824,594,000 | 5.053.022.000 | 3.730.000.000 | 4.445.000.000 | 4.255.000.000 | 6.405.000.000 |
| 210 | Komunikasi Dan Informatika | 6,948,160,000 | 4.332.000.000 | 3.000.000.000 | 3.727.000.000 | 3.727.000.000 | 4.727.000.000 |
| 211 | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 85,000,000 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |
| 212 | Penanaman Modal | 90,000,000 | 1.355.000.000 | 1.310.000.000 | 1.310.000.000 | 1.310.000.000 | 1.310.000.000 |
| 213 | Kepemudaan Dan Olah Raga | 910,000,000 | 1.600.000.000 | 5.690.000.000 | 5.895.000.000 | 6.100.000.000 | 6.910.000.000 |
| 214 | Statistik | 549,720,000 | 470.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 214 | Persandian | 672,922,000 | | 75.000.000 | 85.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| 216 | Kebudayaan | 679,000,000 | 1.125.000.000 | 2.000.000.000 | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 217 | Perpustakaan | 275,000,000 | 847.000.000 | 1.803.000.000 | 1.788.400.000 | 1.851.320.000 | 1.916.886.001 |
| 218 | Kearsipan | 1,220,000,000 | 375.000.000 | 545.400.000 | 467.500.000 | 467.500.000 | 467.500.000 |
| 301 | Kelautan Dan Perikanan | 1,212,727,500 | 1.321.500.000 | 1.321.500.000 | 1.321.500.000 | 1.321.500.000 | 2.000.000.000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 302 | Pariwisata | 19,907,300,000 | 1.960.000.000 | 4.010.000.000 | 4.020.000.000 | 4.160.000.000 | 5.000.000.000 |
| 303 | Pertanian | 3,449,067,000 | 14.992.500.000 | 14.722.500.000 | 15.155.000.000 | 16.110.000.000 | 17.370.000.000 |
| 306 | Perdagangan | 319,504,500 | 4.115.000.000 | 3.760.000.000 | 3.760.000.000 | 3.760.000.000 | 4.500.000.000 |
| 307 | Perindustrian | 2,419,130,000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 401 | Perencanaan | 7,124,544,940 | 3.960.000.000 | 3.370.000.000 | 3.420.000.000 | 3.470.000.000 | 3.595.000.000 |
| 402 | Keuangan | 2,456,976,800 | 7.990.000.000 | 7.785.000.000 | 7.585.000.000 | 7.585.000.000 | 7.585.000.000 |
| 403 | Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan | 431,020,000 | 3.790.000.000 | 3.790.000.000 | 3.790.000.000 | 3.790.000.000 | 3.790.000.000 |
| 404 | Penelitian Dan Pengembangan | 1,404,080,000 | 1.125.000.000 | 1.125.000.000 | 1.125.000.000 | 480.000.000 | 899.999.999 |
| 405 | Pengawasan | 49,596,129,516 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
| 406 | Administrasi Pemerintahan | 64,698,120,629 | 52.169.735.000 | 60.778.235.300 | 61.341.335.300 | 62.502.590.300 | 62.908.408.050 |
| 407 | Pendukung Urusan Perangkat Daerah | 24,710,636,500 | 54.958.057.996 | 56.190.217.996 | 56.190.217.996 | 56.190.217.996 | 60.190.217.996 |

